

**PENGARUH INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI PROVINSI RIAU**

Oleh:

Dede Afri Maidoni

Pembimbing : Hainim Kadir dan Toti Indrawati

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : dedeafri.maidoni@gmail.com

*The Influence of Human Resources Investment And Per Capita Income
Against Human Development Index (HDI)
In Riau Province*

ABSTRACT

This research intend to understand and analyzing the influence of human resources investment through the allocation of government education sector, the health sector and income per capita against the human development index (HDI) in Riau Province. This research uses secondary data from the years 2004-2013, published by the central bureau of statistics Indonesia. The analytical method used is multiple liniear regression analysis with SPSS 20. Simultaneously, this research showed that spending of government education variable, spending of government health variable and per capita income variable is jointly affect the human development index (HDI). Partialy showed that per capita income is only a significicant effect on the human development index (HDI). While the spending of government education sector variable and spending of government health sector variable doesn't significantly influence against the human development index(HDI) in Riau Province. The amount due to the influence of three independent variables simultaneously against dependent variable is 96,9% while the remaining 3,4% is influenced by other variables which is not examined in this research.

Keywords: human development index (HDI), allocation of government education sector, allocation of government health sector and per capita income.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat yang sejahtera. Pembangunan sumber daya manusia bertujuan peningkatan kapasitas dasar

penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi kelanjutan ekonomi suatu negara. Demi meningkatkan kelanjutan ekonomi suatu negara tersebut, pengembangan kualitas akan kebutuhan sumber daya manusia yang

handal dan berkualitas menjadi tugas negara dalam mewujudkannya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu negara dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM).

Sejak tahun 1990, *United Nations Development Program (UNDP)* telah menerbitkan suatu indikator yang menggabungkan faktor ekonomi dan non-ekonomi yang dapat mendefinisikan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar *Pendapatan Domestik Bruto (PDB)* yang dinamakan *Human Development Index (HDI)* atau yang sering disebut dengan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut yaitu : indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas nonfisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil perkapita

Faktor-faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi IPM tersebut dapat diamati dari kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Modal manusia (*Human Capital*) merupakan salah satu indikator dalam sebuah proses pertumbuhan ekonomi, dengan sumber daya manusia yang berkualitas perkembangan dan kinerja

dari perekonomian diyakini juga akan lebih baik. Kualitas sumber daya manusia ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan indikator-indikator lainnya. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan dan kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi karna diyakini dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi juga akan lebih baik.

Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah telah meningkatkan pembangunan sumber daya manusianya. Hal ini terwujud dalam bentuk alokasi dana pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan teori pertumbuhan baru, yang menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan peranan modal manusia (*Human Capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktifitas, dimana pertumbuhan produktifitas tersebut pada akhirnya merupakan motor penggerak pertumbuhan (*Engine of Growth*).

Dalam kasus Indonesia, seperti disebutkan dalam *Indonesia Human Development Report 2004*, perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970 sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran

untuk kesehatan dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sangat sedikit.

Berdasarkan data alokasi APBD Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Riau tahun 2004-2013 dapat dilihat bahwa pemerintah terus meningkatkan alokasi belanja daerah, pada tahun 2004 total alokasi APBD Provinsi Riau sebesar Rp.2.437.724.828.920 rupiah kemudian pada tahun 2008 naik menjadi Rp.3.099.199.012.426 rupiah dan pada tahun 2013 naik hingga di angka Rp.8.915.523.031.721 rupiah guna terus meningkatkan mutu dan pelayanan yang ada dan akan berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja di bidang pendidikan dan kesehatan yang ada di Provinsi Riau.

Dari data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Riau tahun 2014, alokasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada tahun 2004-2013 secara keseluruhan cenderung fluktuatif. Pada sektor pendidikan tahun 2004 alokasi untuk pendidikan sebesar Rp. 419.080.186.050 rupiah namun terjadi penurunan tahun 2008 menjadi Rp.334.478.047.165 rupiah dan kemudian naik kembali menjadi Rp.441.579.297.150 rupiah pada tahun 2013, kenaikan yang terjadi tahun 2008 sampai 2013 tersebut hampir sekitar 32%. namun persentase pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dari keseluruhan total APBD justru cenderung menurun dimana pada tahun 2013 sebesar 4,95% cenderung rendah jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebesar 10,79%. Begitu juga yang terjadi disektor kesehatan

dimana pada tahun 2013 dialokasikan sebesar 6,5% dan ditahun 2008 hanya sekitar 2,6% dari keseluruhan alokasi yang dianggarkan pemerintah di APBD Provinsi Riau. Melihat alokasi yang dianggarkan pemerintah pada APBD terutama dibidang kesehatan dan pendidikan, menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Riau.

Berdasarkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) secara umum pembangunan manusia di Provinsi Riau mengalami peningkatan kurun waktu 2004-2013 hal ini terkait dengan perekonomian yang semakin membaik secara keseluruhan. Selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan masih ada prasyarat lain yang harus terlaksana secara konsisten, yaitu pemerataan distribusi pendapatan. Untuk melihat baik buruknya perekonomian maka dapat dilihat dari pendapatan perkapita di Provinsi Riau, dimana pendapatan perkapita sangat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat dan upaya dalam peningkatan kualitas masyarakat itu sendiri. Dapat kita lihat juga kapabilitas penduduk dapat secara bertahap ditingkatkan yang semuanya akan terangkum dalam nilai indeks pembangunan manusia (IPM).

Berdasarkan data IPM Provinsi Riau rata-rata lama sekolah ternyata masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau hanya 8,58 di tahun 2010 dan 8,64 di tahun 2012 dimana hanya setara dengan SMP disetiap tahunnya. Sedangkan pada komponen melek huruf dimana angka melek huruf ditahun 2010 adalah 98,35% dan pada tahun 2012 meningkat pada angka 98,45% dimana dapat di simpulkan

bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Riau mampu membaca. Angka harapan hidup juga terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, ditahun 2004 angka harapan hidup sebesar 69,80 tahun kemudian mengalami peningkatan menjadi 71,73 tahun di 2013.

Dari data yang dikeluarkan BPS tahun 2014 juga dapat digambarkan setiap tahunnya angka IPM di Provinsi Riau mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006 indeks pembangunan manusia mencapai 73,80 yang kemudian meningkat menjadi 76,90 pada tahun 2012, bukan hanya Provinsi Riau secara keseluruhan namun juga semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau mengalami peningkatan terutama Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang mengalami tingkat peningkatan yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya

Selain investasi modal manusia, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan perkapita. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu wilayah maka mengindikasikan kondisi ekonomi wilayah tersebut semakin makmur. tingkat perkembangan ekonomi masyarakatnya pun meningkat pula yang akan berpengaruh terhadap belanja masyarakat, pendidikan dan kesehatan yang makin baik juga akan berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pendapatan regional perkapita di Provinsi Riau pada tahun 2007 sebesar Rp.7.106.843 rupiah namun pada tahun 2013 pendapatan regional perkapita di Provinsi Riau naik menjadi Rp. 9.092.601 rupiah. Ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan

yang cukup signifikan dalam beberapa tahun. Tingkat kemajuan suatu pembangunan dapat dilihat melalui pencapaian tingkat pertumbuhan dari pendapatan perkapita (*income per capita*).

Namun dalam penelitian ini hanya membatasi pada variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan saja. Karena banyaknya kebijakan yang berhubungan pada investasi sumber daya manusia seperti pemberian pelatihan dan keterampilan yang diberikan pemerintah maupun swasta, diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya untuk merealisasikan kebijakan tersebut pemerintah telah mengalokasikan pendanaan dalam anggaran belanjanya yang mengharuskan agar mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk sektor kesehatan dari total APBN ataupun APBD sesuai dengan UU No.20 tahun 2003 pasal 49 tentang pendidikan dan UU No.36 tahun 2009 pasal 171 tentang kesehatan dan juga pendapatan perkapita untuk melihat tingkat kemakmuran serta kualitas hidup masyarakat, serta diharapkan pendapatan perkapita yang tinggi berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang baik dari segi kesehatan dan pendidikannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Alokasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau?”

Untuk membantu penulis agar terarah dan keterbatasan kemampuan, maka penulis memberikan batasan dalam analisis yang akan dilakukan sebagai berikut: Investasi sumber daya manusia diukur dengan pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan sektor kesehatan, pendapatan perkapita dilihat berdasarkan angka pendapatan regional perkapita, data yang digunakan adalah dari tahun 2004-2013 (Time Series).

TELAAH PUSTAKA

Human capital

Modal Manusia (*human Capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik, sesuai dengan yang dikatakan Mubyarto dalam Mirza (2012). Menurut Todaro (1998), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan.

Menurut Sumarsono (2009: 91) bahwa investasi dibidang sumber daya manusia adalah pengorbanan sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Imbalan yang akan diperoleh adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Investasi yang demikian dinamakan Human Capital yang penerapannya dapat dilakukan dalam hal : (1) pendidikan dan latihan; (2) migrasi ; (3) perbaikan gizi dan kesehatan.

Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan

meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi karna dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Ada lima cara pengembang-an sumber daya manusia, yaitu : (1) Fasilitas dan Pelayanan kesehatan, (2) Latihan, (3) Pendidikan formal, (4) Program studi, (5) Migrasi (Jhiangan,2004 : 414).

Pendidikan.

Menurut BPS pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas SDM sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pentingnya pendidikan tercermin dalam undang-undang 1945 dan GBHN dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat peningkatan kemampuan manusia. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Mulyadi,2003: 41).

Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan

adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk membentuk kemampuan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktifitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik (Todaro,2006: 434).

Kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia. Faktor-faktor ini secara langsung akan berpengaruh pada kinerja fisik dan pada mental sumber daya manusia. Kualitas fisik dan mental yang bagus selanjutnya akan berpengaruh positif pada kapasitas kerja (Mulyadi,2003: 207).

Indikator kesehatan merupakan petunjuk untuk menemukan seberapa besar bobot masalah kesehatan yang muncul ditengah masyarakat. Salah satunya aspek kesehatan yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat adalah dimanfaatkan indikator rata-rata usia penduduk dan angka kematian bayi. Kedua indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat telah digabungkan pula dengan memanfaatkan indikator melek huruf. Sehingga gabungan ketiga ukuran tersebut telah menghasilkan suatu indeks yang menyatakan mutu fisik hidup manusia (Elfrida,2003: 8-42).

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut (Sukirno,2004 : 423).

Menurut Sumitro dalam Setyopurwanto (2013) menyatakan bahwa perkembangan pembangunan ekonomi sebagai usaha untuk memperbesar pendapatan perkapita sebagai tolak ukur dalam menentukan pembangunan ekonomi yang dapat menaikkan produktifitas perkapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah keterampilan. Dengan demikian pembangunan ekonomi berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu angka indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan basis komponen dasar kualitas hidup (BPS, 2012: 11).

Menurut Kuncoro (2004: 119) komponen indeks pembangunan manusia meliputi (1) *Longevity* diukur dengan menggunakan indikator harapan hidup berdasarkan variabel rata-rata jumlah kelahiran hidup dan jumlah rata rata anak yang tetap hidup, (2) pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu tingkat melek huruf dengan melihat jumlah

penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang mampu membaca dan menulis huruf latin dan sebagai persentase terhadap jumlah total penduduk berusia 15 tahun dan indikator rata-rata lama sekolah dengan melihat rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan oleh penduduk berusia 15 tahun atau lebih, (3) standar hidup layak diperoleh dengan menggunakan indikator tingkat konsumsi riil perkapita yang disesuaikan.

Pencapaian kualitas pembangunan manusia salah satunya dapat diukur melalui indeks yang sering disebut dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks tersebut disusun atas tiga unsur pokok, yakni : (1) aspek kesehatan yang diukur dari usia harapan hidup; (2) aspek pendidikan yang diukur dari kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah dan (3) aspek ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pendapatan perkapita pada IPM, ini karena pendapatan perkapita memegang peranan cukur dalam peningkatan kualitas manusia (Todaro,2000: 71).

Menurut Elfindri (2003: 63) proses pencapain IPM Indonesia dihasilkan atas akumulasi tiga bentuk investasi yaitu : *pertama*, investasi melalui perbaikan kesehatan dan gizi. *Kedua*, invetasi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. *Ketiga* investasi dalam bentuk post training sebagai konsekuensi dari hasil investasi bentuk pertama dan kedua, khususnya diperoleh sebelum atau sewaktu penduduk berstatus tenaga kerja

HIPOTESIS

Berdasarkan pada latar belakang dan landasan teori, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, karena dengan investasi pemerintah tersebut maka peluang akan memperoleh pendidikan akan semakin baik dan ini akan berpengaruh terhadap indikator angka melek huruf dan lama sekolah yang ada pada indeks pembangunan manusia (IPM).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, karena dengan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai maka tingkat kesehatan sumber daya manusia akan semakin baik dan akan berpengaruh pada angka harapan hidup yang merupakan salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dimana dengan pendapatan perkapita yang tinggi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang serta peningkatan kualitas hidup seseorang baik dari segi pendidikan dan tingkat kesehatan yang mana merupakan salah satu indikator IPM.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Riau. karena Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki anggaran yang besar pada sektor pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan sumatera. Selain itu melihat upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas di bidang kesehatan dan kualitas pendidikan, serta melihat rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Riau yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder, Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang diperoleh dari BPS, data APBD bidang pendidikan, data APBD bidang kesehatan, data pendapatan regional perkapita yang juga di peroleh dari Badan Pusat statistic (BPS), dan data-data lain yang di anggap relevan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Studi Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan kajian pustaka dan referensi atau atikel-artikel ilmiah yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. 2). Menghimpun data sekunder, yakni data dan informasi yang telah di publikasikan oleh instansi-instansi terkait.

ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh investasi disektor pendidikan, investasi sektor kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia yang di lihat dari pertumbuhan dan perkembangan angka indeks pembangunan manusia dari tahun ke tahun alat analisis yang digunakan regresi linier berganda (multiple linear regression) dengan fungsi (Suharyadi dan Purwanto, 2004 : 508) : $Y = f (X_1, X_2, \dots, X_n)$. kemudian di bentuk dalam persamaan ekonometrika dengan persamaan linier berganda :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \mu$$

Dimana:

Y = Indeks pembangunan manusia (IPM) (%)

b₀ = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien regresi

X₁ = Belanja pemerintah dibidang pendidikan (Rp)

X₂ = Belanja pemerintah dibidang kesehatan (Rp)

X₃ = Pendapatan perkapita (Rp)

μ = Variabel pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

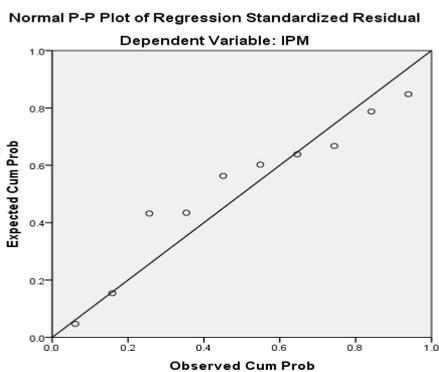
Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Sebelum melakukan analisis data, maka dilakukan pengujian asumsi normalitas. Dari gambar

berikut dapat terlihat bahwa sebaran data tersebar sekitar garis lurus (tidak terpencar jauh dari garis lurus) maka dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas dipenuhi pada data IPM. Hal ini berarti sebaran data penelitian secara kumulatif adalah normal. Maka regresi ini memenuhi asumsi normalitas, sehingga uji t dapat dilakukan untuk menguji hipotesis. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Gambar 5
Normal Probability



Standardized Residual

Sumber : Data Sekunder Olahan, 2015

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Nilai Tolerance dan VIF

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pendidikan	.553	1.810
Kesehatan	.163	6.142
Pendapatan perkapita	.201	4.973

Sumber : Data Sekunder Olahan, 2015

Maka hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

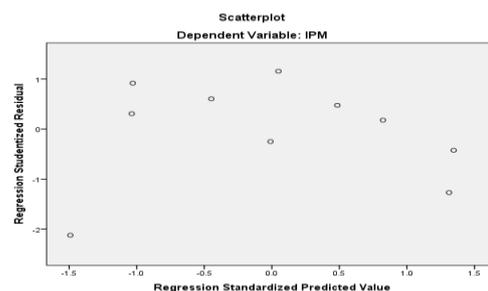
multikolinearitas diantar variabel investasi pendidikan, investasi kesehatan dan pendapatan perkapita pada persamaan regresi karena VIF < 10 dan Tolerance > 0,1.

Hasil Uji Autokorelasi

Dari hasil penghitungan SPSS dibawah maka dapat diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) = 1,424. Dengan demikian DW berada diantara -2 dengan +2, dengan demikian dapat disimpulkan bahwatidak terjadi autokorelasi dalam model analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heterskedastisitas

Gambar 6
Scatter Plot



Sumber : Data Sekunder Olahan, 2015

Hasil yang ditunjukkan pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu pola dan memiliki pola menyebar, dimana hal ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami gejala heterokedastisitas, yang berarti bahwa varians sampel dari residual pengamatan ke pengamatan lain mempunyai kesamaan sehingga penaksiran yang diperoleh menjadi efisien. Dengan demikian berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh hasil model penelitian bebas dari autokorelasi,

multikolinearitas, heterokedastisitas, sehingga layak digunakan sebagai model dalam penelitian ini

5. Analisis Regresi Berganda

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda yang menganalisis bagaimana pengaruh investasi sumber daya manusia yaitu alokasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, alokasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dengan Program SPSS versi 20 maka diperoleh hasil regresi dengan model:

$$Y = 59,202 + 3,272E-012 X_1 - 2,728E-012 X_2 + 2,008E-006 X_3 + \mu$$

Hasil Uji Kelayakan Model (Goodness Of Fit)

Hasil Uji Simultan (F) Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	22.910	3	7.637	62.794	.000 ^b
Residual	.730	6	.122		
Total	23.639	9			

Sumber : Data Sekunder Olahan,2015

Berdasarkan hasil pada tabel diperoleh nilai F hitung dengan taraf signifikan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah 62,794 dan tingkat Probabilitas (sig) adalah 0,000 , diperoleh F tabel sebesar 4,76. Maka F hitung > F tabel yaitu 62,794 > 4,76 dengan tingkat

probabilitas $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan menerima H_a . Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf level of signifikan 95% secara bersama-sama seluruh variabel independen APBD bidang pendidikan, APBD bidang kesehatan dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.984 ^a	.969	.954	.34873	1.424

Sumber : Data Sekunder Olahan,2015

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas diperoleh nilai R² sebesar 0,969. Hal ini berarti 96,6% indek pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau pada tahun 2004-2013 dipengaruhi oleh APBD bidang pendidikan, APBD bidang kesehatan dan pendapatan perkapita sedangkan 3,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (T)

Dalam penelitian ini, uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (pervariabel) yaitu investasi sumber daya manusia oleh pemerintah melalui APBD bidang pendidikan, bidang kesehatan dan pendapatan

perkapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan hasil pengujian parsial masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	59.202	2.689		22.019	.000
Pendidikan	3.272E-012	.000	.090	.933	.387
Kesehatan	2.728E-012	.000	-.246	-1.385	.215
Pendapatan	2.008E-006	.000	1.177	7.358	.000

Sumber : Data Sekunder Olahan, 2015

Nilai konstan (b_0) sebesar 59,202 menyatakan bahwa jika semua variabel independen APBD bidang pendidikan, APBD bidang kesehatan dan pendapatan perkapita dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*) maka indeks pembangunan manusia (IPM) adalah 59,20.

Nilai koefisien (b_1) adaah sebesar 0,000000000003272, dari tabel 5.7 diperoleh nilai thitung dari variabel APBD bidang pendidikan dengan taraf signifikan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah 0,993, dengan nilai ttabel nya adalah 2,447. Dari hasil perbandingan antara thitung dengan ttabel ternyata $0,993 < 2,447$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikan $0,387 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf level if

significant 95% menyatakan bahwa APBD bidang pendidikan di Provinsi Riau tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau.

Nilai koefisien (b_2) adalah sebesar -0,000000000002728, nilai t koefisien regresi APBD bidang kesehatan adalah sebesar -1,385, dengan nilai ttabel nya adalah 2,447. Dari hasil berbandingan antara thitung dan ttabel ternyata ttabel $>$ thitung dimana $2,447 > -1,385$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikan $0,217 > 0,05$ dengan derajat kesalahn 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara APBD bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.

Nilai koefisien (b_3) adalah sebesar 0,000002008, nilai t untuk koefisien regresi pendapatan perkapita diperoleh thitung dengan taraf signifikan 95% ($\alpha = 5\%$) adalah 7,356 dengan tingkat probabilitas (sig) adalah 0,000. Maka dengan demikian thitung $7,356 >$ ttabel 2,447 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf level of significant 95% menyatakan bahwa pendapatan regional perkapita Provinsi Riau berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan asumsi variabel lain tetap, jika pendapatan perkapita meningkat Rp. 1.000.000 rupiah maka IPM akan bertambah 2,008%.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau

Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan (X_1) dengan koefisien regresi sebesar 0,000000000003272. Diperoleh t hitung lebih kecil dari pada t tabel ($0,993 < 2,447$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikan sebesar $0,387 > 0,05$, sehingga pengeluaran pemerintah disektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Menurut hasil pengujian yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM sehingga koefisien regresi yang dihasilkan tidak dapat diinterpretasikan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara statistik tidak berpengaruh signifikan. Dikarenakan bahwa mutu pendidikan nasional yang masih rendah, selain itu mutu tenaga pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidikan terutama di daerah pedesaan masih sangat kurang, karena kurangnya pemerataan tenaga pendidik yang terfokus pada kota besar saja, masih kurangnya juga pemerataan fasilitas pendidikan yang terfokus hanya pada ibukota Provinsi dan pemerataan akses pendidikan antara penduduk miskin dan kaya dalam mengikuti pendidikan formal, dan juga karena alokasi dana yang diberikan masih jauh dari pada standar yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 20 persen dari total APBD yang mana untuk sektor pendidikan ini pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 4,95% dari

keseluruhan total alokasi APBD di Provinsi Riau.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau

Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan (X_2) dengan koefisien regresi sebesar -0,00000000002728. Dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang ternyata t tabel $>$ t hitung ($2,447 > -1,385$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikan $0,215 > 0,05$ sehingga pengeluaran pemerintah disektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Menurut hasil pengujian yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM sehingga koefisien regresi yang dihasilkan tidak dapat juga diinterpretasikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara statistik tidak berpengaruh signifikan. Dikarenakan berdasarkan realisasi dana bidang kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Riau sangat kecil dan cenderung fluktuatif, walupun sarana kesehatan terus meningkat dari jumlah rumah sakit, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya, namun jumlah rasio dari tenaga kesehatan itu sendiri masih sangat kurang dan jauh dari target yang diinginkan baik dokter spesialis, dokter umum, bidan, atupun perawat, dimana sesuai renstra target rasio dokter umum adalah 35 dokter per 100.000 penduduk namun Provinsi Riau tercatat hanya 17,7 dokter per 100.000 penduduk.

Kendala lainnya adalah kurangnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau karna masih terjadinya pemusatan di ibukota Provinsi. Ditambah lagi karena dana yang dialokasikan setiap tahunnya masih jauh dari yang diatur oleh undang-undang No 36 tahun 2009 yang mana minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sedangkan di Provinsi Riau sendiri pada tahun 2008 hanya 2,6% dari keseluruhan alokasi yang dianggarkan dan pada tahun 2013 dialokasikan hanya sebesar 6,5% dari total APBD.

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau

Koefisien pendapatan perkapita sebesar 0,00002008. Artinya jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1 juta Rupiah maka terjadi kenaikan pada indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 2,008%. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendapatan perkapita memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau, artinya semakin banyak pendapatan perkapita yang diperoleh maka semakin naik pula indeks pembangunan manusia (IPM) dan semakin sedikit pendapatan perkapita yang diperoleh maka semakin sedikit pula peningkatan IPM tersebut. Untuk variabel pendapatan perkapita (X_3) diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel yakni $7,356 > 2,447$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau. Signifikannya pendapatan perkapita lebih disebabkan karena tingginya pendapatan perkapita menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pendapatan perkapita dan perubahan dari pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat akan meningkatkan indeks pembangunan manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya pendapatan perkapita maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Variabel pengeluaran sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau. Dapat dilihat berdasarkan t hitung yang lebih kecil dibanding t tabel yakni $0,993 < 2,447$ yang mana H_0 diterima dan H_a ditolak dengan tingkat signifikan $0,387 > 0,05$, dengan derajat kesalahan 5%. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesa.
2. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi

Riau yang dibuktikan dengan t tabel lebih besar dari t hitung ($2,447 > -1,385$) dengan derajat kesalahan 5%. Ini tidak sesuai dengan hipotesa.

3. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau yang dibuktikan dengan t hitung lebih besar dibandingkan t tabel ($7,356 > 2,447$) dengan derajat kesalahan sebesar 5% dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Pendapatan perkapita secara individual memiliki hubungan yang positif dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Nilai koefisien regresi pendapatan perkapita sebesar 0,000002008 artinya jika terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar 1 juta rupiah maka indeks pembangunan manusia akan meningkat 0,000002008 (*ceteris paribus*). Hal ini sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan masyarakat haruslah diperhatikan. Dengan membangun sarana dan

prasarana penunjang seperti program sekolah gratis untuk masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana kesehatan dan asuransi kesehatan gratis serta penciptaan lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat memanfaatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya meningkatnya IPM.

2. Pemerintah Provinsi Riau harus lebih memperhatikan alokasi dan realisasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Karena masing-masing variabel masih kurang berpengaruh terhadap IPM karena disebabkan kurangnya realisasi anggaran tersebut. Sehingga diharapkan jika realisasi baik maka akan meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan yang akan berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perlu penyusunan program-program oleh pemerintah dalam upaya peningkatan Indeks pembangunan manusia (IPM) melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi serta aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2004-2013. *Riau Dalam Angka*. BPS Provinsi Riau.

- BPS. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. BPS Provinsi Riau.
- Elfrida, 2003. *Ekonomi layanan Kesehatan*, Universitas Andalas, Padang.
- Jhingan, M. L, 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro. Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta.
- Mirza, Denny Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2008*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Mulyadi , 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Setyopurwanto, Didi. 2013. *Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia dan Investasi Modal Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Indonesia*. Universitas brawijaya. Malang.
- Suharyadi, Purwanto SK. 2004. *.Statistik : Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Salema Empat : Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar makro Ekonomi*. PT, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumarsomo, Sonny, 2009, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Todaro, M.P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga : Jakarta.
- Todaro, Michael dan Stephen Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga : Jakarta.

